

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA DIBAWAH UMUR
DALAM PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN
(STUDI KASUS DI KECAMATAN SUBI KABUPATEN NATUNA)**

**Oleh
Nurhapizah
Nim : 180574201022**

Abstrak

Setiap manusia dilahirkan berpasang-pasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan dan mereka diciptakan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) melalui hubungan perkawinan. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan dibawah tangan adalah suatu perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan pada hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, akan tetapi tidak terdaftar atau tercatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau dan mengetahui apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah tangan serta perlindungan hukum terhadap wanita dibawah umur yang menikah dibawah tangan di Kecamatan Subi Kabupaten Natuna. Teori yang digunakan adalah teori efektivitas hukum dan teori perlindungan hukum Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *normatif-empiris* dengan informan sebanyak 14 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor perkawinan dibawah tangan yang dilakukan oleh wanita dibawah umur di Kecamatan Subi Kabupaten Natuna ada empat faktor, pertama hukum atau peraturan itu sendiri, kedua mentalitas petugas pelaksanaan hukum, ketiga fasilitas pendukung pelaksanaan hukum, dan keempat kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku masyarakat. Sedangkan perlindungan hukum dari perkawinan dibawah tangan ini dapat melalui perlindungan hukum *in abstracto*, yaitu memastikan bahwa perkawinan tersebut sah dan segera dicatatkan, dengan kata lain perkawinan harus didahului hukum agama masing-masing karena hukum agamalah yang menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Upaya yang dapat dilakukan agar perkawinan dibawah tangan tersebut sah menurut hukum perkawinan nasional, yaitu mencatatkan perkawinan dengan itsbat nikah dan melakukan perkawinan ulang. Kedua perlindungan hukum *inconcrito*, yaitu dengan memastikan bahwa penegakan secara efektif dan efisien terhadap ancaman pidana yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak, dan harus diterapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam perkawinan anak dibawah tangan.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Wanita Dibawah Umur, Perkawinan Dibawah Tangan.

LEGAL PROTECTION FOR UNDERAGE WOMEN IN UNREGISTERED MARRIAGE (CASE STUDY IN SUBI DISTRICT, NATUNA REGENCY)

By
Nurhapizah
Nim : 180574201022

Abstract

Every human being is born in pairs, consisting of men and women and they are created to form a family (household) through marriage. Marriage is considered valid if it is carried out according to religious law and individual beliefs and each marriage is recorded according to the applicable laws and regulations. Unregistered marriage is a marriage that is carried out only based on the laws of each religion and belief, but is not registered or recorded according to the applicable laws and regulations. This study aims to review and find out what are the factors causing unregistered marriages and legal protection for underage women who marry unregistered in Subi District, Natuna Regency. The theory used is the theory of legal effectiveness and legal protection theory. The method used in this research is normative-empirical with 14 informants. Data collection techniques are carried out through observation, interviews, and documentation. The results showed that the factor of unregistered marriage carried out by underage women in Subi District, Natuna Regency, there were four factors, the first was the law or the regulation itself, the second was the mentality of law enforcement officers, the third was law enforcement support facilities, and the fourth was legal awareness, legal compliance and community behavior. Meanwhile, legal protection for unregistered marriages can be through legal protection in abstracto, namely ensuring that the marriage is legal and immediately registered, in other words, marriage must be preceded by the respective religious laws because religious law determines whether a marriage is legal or not. Efforts that can be made so that unregistered marriages are legal according to national marriage law, namely registering marriages with itsbat nikah and re-marriage. Second, in concreto legal protection, namely by turning off effective and efficient enforcement of criminal threats stipulated in the Child Protection Act, and must be applied to all parties involved in unregistered child marriage. and must be applied to all parties involved in unregistered child marriage.

Keywords: Legal Protection, Underage Women, Unregistered Marriage.